

BAB II
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KEKUATAN
POLITIK TALIBAN DI AFGHANISTAN

2.1 Latar Belakang Gerakan Taliban

Gerakan Taliban berakar dari perang Soviet-Afghanistan (1979–1989), di akhir April 1992, tumbangnya pemerintahan Soviet Najibullah di Kabul dan kemenangan Mujahidin, dibawah pimpinan Ahmad Syah Mas'ud, memunculkan euphorik sekaligus kepahitan evolusi sejarah di Afghanistan. Tertendangnya pemerrintahan Najibullah merupakan hasil usaha gigih pengambilalihan kekuasaan oleh Mujahidin disambut gembira rakyat Afghan, dengan harapan mereka bisa mengembalikan negaranya yang babak belur akibat perang pada suasana damai dan teratur.⁵³ Namun harapan pupus manakala para pemimpin Mujahidin bertarung antar mereka sendiri persis seperti yang terjadi tiga belas tahun sebelumnya.

Perpecahan di tubuh Mujahidin pasca kemenangan atas Najibullah justru menjadi titik awal dari babak baru penderitaan rakyat Afghanistan.⁵⁴ Alih-alih mewujudkan stabilitas dan membangun sistem pemerintahan yang inklusif pasca-perang, para faksi Mujahidin justru saling mencurigai dan memerangi satu sama lain. Faksi-faksi besar seperti Jamiat-e Islami yang dipimpin oleh Ahmad Syah Mas'ud, Hezb-e Islami di bawah Gulbuddin Hekmatyar, dan Ittehad-e Islami yang dipimpin Abdul Rasul Sayyaf, terlibat dalam perebutan kekuasaan yang brutal.⁵⁵ Pertempuran antar mereka di Kabul

⁵³ Maley, *Taliban Dan Multikonflik Di Afghanistan*.

⁵⁴ Antonio Giustozzi, *Empires of Mud: Wars and Warlords in Afghanistan* (Hurst & Company, 2009).

⁵⁵ *Ibid.*

menghancurkan sebagian besar infrastruktur kota dan menewaskan puluhan ribu warga sipil. Pertikaian ini menggambarkan kegagalan elit Mujahidin dalam mengelola transisi kekuasaan secara damai dan berorientasi pada kepentingan nasional.⁵⁶

Kekecewaan rakyat Afghanistan terhadap para komandan Mujahidin semakin mendalam. Mereka yang sebelumnya dianggap sebagai pahlawan perlawanan terhadap pendudukan Soviet, berubah menjadi simbol keserakahan, faksionalisme, dan kekacauan.⁵⁷ Rakyat yang telah lelah berperang dan menginginkan ketenangan justru dihadapkan pada kondisi yang tidak jauh berbeda dengan masa penjajahan. Ketidakamanan, korupsi, serta absennya pemerintahan yang sah dan efektif mendorong munculnya kerinduan akan stabilitas dan ketertiban, meskipun dengan mengorbankan sebagian kebebasan sipil dan politik. Dalam konteks inilah, Taliban mulai muncul sebagai kekuatan alternatif yang menjanjikan ketertiban dan keadilan dengan menerapkan hukum Islam secara ketat dan seragam.⁵⁸

Taliban lahir dari jaringan madrasah di Pakistan, khususnya di wilayah perbatasan seperti Quetta dan Peshawar, yang banyak dihuni oleh pengungsi Afghanistan selama perang Soviet.⁵⁹ Di bawah asuhan ulama-ulama konservatif dan dengan semangat puritanisme Islam Sunni, khususnya dari mazhab Deobandi, para pemuda ini tumbuh dengan doktrin yang menggabungkan nasionalisme Pashtun dan idealisme Islam radikal. Mullah Mohammad Omar, seorang mantan komandan Mujahidin dari Kandahar, menjadi tokoh sentral dalam pergerakan ini. Taliban mengklaim sebagai gerakan yang lahir dari

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Al-Ghifari Ahda Abid, 'Dinamika Politik Afghanistan Pada Masa Pemerintahan Taliban (1996-2001)'.

⁵⁸ Sadat Nasr, *The Taliban's Governance Project in Afghanistan*, 2018.

⁵⁹ William Maley, 'The Foreign Policy of the Taliban', in *Fundamentalism Reborn? Afghanistan and the Taliban*, ed. by William Maley (Hurst & Co, 2001).

rakyat, bukan dari elit lama yang saling berseteru. Mereka dengan cepat mendapatkan dukungan di wilayah selatan Afghanistan, khususnya dari masyarakat Pashtun yang lelah dengan konflik elit dan menginginkan pemulihan martabat serta stabilitas.⁶⁰

Kesuksesan awal Taliban dalam mengamankan wilayah selatan, memberantas para komandan perang lokal, dan memberlakukan hukum secara cepat, membuat mereka semakin populer.⁶¹ Dengan dukungan logistik dan politik dari Pakistan yang melihat Taliban sebagai kekuatan proksi strategis untuk mengamankan kepentingan geopolitik mereka di Afghanistan Taliban mampu memperluas kontrolnya secara sistematis. Pada tahun 1996, mereka berhasil merebut Kabul dan mendeklarasikan berdirinya *Imarah Islam Afghanistan*. Dalam waktu singkat, mereka menguasai hampir 90% wilayah negara. Namun, keberhasilan ini tidak serta-merta membawa kedamaian. Pemerintahan Taliban ditandai oleh penerapan syariat Islam yang ekstrem, penindasan terhadap perempuan, pelarangan pendidikan modern, serta penghapusan institusi-institusi sipil yang pluralis.⁶²

Meskipun mampu menciptakan stabilitas dalam jangka pendek, pemerintahan Taliban mendapat kecaman luas dari komunitas internasional atas pelanggaran HAM yang mereka lakukan.⁶³ Negara-negara Barat, serta sebagian besar negara Muslim moderat, menolak mengakui pemerintahan Taliban. Bahkan di dalam negeri, kelompok-kelompok non-Pashtun seperti Aliansi Utara yang dipimpin oleh Ahmad Syah Mas'ud terus melakukan perlawanan bersenjata. Pemerintahan Taliban menjadi contoh bagaimana

⁶⁰ Septian Fatianda, 'Politik Islam Di Afghanistan: Studi Terhadap Kekuasaan Kelompok Taliban', *Local History & Heritage*, 3.1 (2023), pp. 12–19, doi:10.57251/lhh.v3i1.907.

⁶¹ Giustozzi, *Empires of Mud: Wars and Warlords in Afghanistan*.

⁶² Amnesty International, 'Afghanistan: Taliban's War on Women and Girls', 2023.

⁶³ *Ibid.*

kekacauan politik dan kegagalan transisi demokratis dapat melahirkan bentuk baru otoritarianisme berbasis agama.

Pemerintahan Taliban yang dimulai pada tahun 1996 membawa perubahan yang drastis terhadap struktur sosial dan budaya Afghanistan. Salah satu kebijakan yang paling mencolok adalah penindasan terhadap perempuan. Taliban memberlakukan aturan yang sangat ketat, yang melarang perempuan bekerja, bersekolah, dan keluar rumah tanpa ditemani mahram (laki-laki yang sah).⁶⁴ Wanita Afghanistan dipaksa mengenakan burqa, pakaian yang menutupi seluruh tubuh dan wajah, sebagai bentuk kewajiban untuk menjaga kehormatan dan moralitas, menurut interpretasi Taliban terhadap syariat Islam. Kebijakan ini mengisolasi perempuan dari kehidupan publik, dan mendorong hilangnya akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi. Dalam pandangan Taliban, aturan ini merupakan penerapan Islam yang murni dan benar, meskipun banyak kalangan yang menganggapnya sebagai bentuk kekerasan terhadap hak asasi manusia.⁶⁵

Pada saat yang sama, pemerintahan Taliban melakukan upaya sistematis untuk meruntuhkan warisan budaya Afghanistan. Museum-museum yang menyimpan artefak berharga dari sejarah panjang Afghanistan hancur dihancurkan. Yang paling terkenal adalah penghancuran patung-patung Buddha Bamiyan pada tahun 2001⁶⁶, yang dipandang sebagai salah satu warisan budaya terbesar dunia. Tindakan ini mendapat kecaman keras dari komunitas internasional, namun Taliban bersikeras bahwa itu adalah bagian dari usaha untuk membersihkan simbol-simbol yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mereka

⁶⁴ P, *Afghanistan's Endless War: State Failure, Regional Politics, and the Rise of the Taliban*.

⁶⁵ Maley, *Fundamentalism Reborn?: Afghanistan and the Taliban*.

⁶⁶ UNESCO, 'Commemorating 20 Years since the Destruction of Two Buddhas of Bamiyan, Afghanistan', *World Heritage Convention* <<https://whc.unesco.org/en/news/2253>> [accessed 2 September 2024].

anut. Keputusan ini menggambarkan bagaimana pemerintahan Taliban, dengan interpretasi ekstrem mereka terhadap agama, berusaha untuk menciptakan masyarakat yang sepenuhnya terikat pada prinsip-prinsip yang mereka tetapkan, tanpa memperhatikan keberagaman budaya dan warisan sejarah bangsa tersebut.

Selain itu, di tengah kebijakan represif yang mereka terapkan, ekonomi Afghanistan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Perang yang berkepanjangan, ditambah dengan isolasi internasional dan sanksi yang dijatuhkan kepada negara tersebut, membuat perekonomian Afghanistan hampir tidak berfungsi. Banyak sektor vital seperti pertanian, industri, dan perdagangan yang terganggu. Sementara itu, ketergantungan Afghanistan pada produksi opium meningkat pesat, dengan Taliban memperoleh sebagian besar pendapatannya dari perdagangan narkoba.⁶⁷ Meski mereka secara terbuka menyatakan perang terhadap narkoba dan berjanji untuk mengurangi produksi opium, pada kenyataannya, mereka justru menjadi salah satu aktor utama dalam perdagangan narkoba internasional, yang menjadi sumber pendanaan penting bagi kegiatan mereka dan untuk memerintah negara yang sangat miskin tersebut.

Dalam aspek politik internasional, pemerintahan Taliban tidak diakui oleh sebagian besar negara-negara dunia, yang memandang pemerintahan mereka sebagai pemerintahan yang tidak sah dan represif.⁶⁸ Hanya tiga negara yang mengakui Taliban secara resmi: Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, menganggap Taliban sebagai organisasi teroris yang memiliki hubungan dengan Al-Qaeda, kelompok yang bertanggung jawab atas serangan 11 September 2001 di

⁶⁷ Afghanistan Research and Evaluation Unit, 'Taliban's Economic Policies and the Opium Economy' (2000).

⁶⁸ Tilmann J. Roder, 'Complementarity and Conflict: State, Islamic, and Customary Justice in Afghanistan', *Journal of Afghan Legal Studies*, 2 (2017), p. 213.

Amerika Serikat. Hubungan antara Taliban dan Al-Qaeda, yang semakin erat, semakin memperburuk citra internasional mereka. Taliban memberikan perlindungan kepada Osama bin Laden, yang akhirnya menjadi alasan utama intervensi militer internasional dipimpin oleh AS pada akhir 2001, yang dikenal dengan nama Operasi Enduring Freedom.⁶⁹

Perlawanan terhadap pemerintahan Taliban tidak hanya datang dari luar negeri. Di dalam negeri, sebagian besar masyarakat Afghanistan, terutama kelompok etnis non-Pashtun seperti Tajik, Hazara, dan Uzbek, merasa terpinggirkan dan terdiskriminasi oleh kebijakan Taliban yang sangat berfokus pada dominasi Pashtun. Gerakan perlawanan utama terhadap Taliban muncul melalui Aliansi Utara, yang terdiri dari pasukan yang dipimpin oleh Ahmad Shah Mas'ud, seorang pemimpin Mujahidin yang terkenal.⁷⁰ Mereka berperang melawan Taliban di bagian utara Afghanistan, sementara pasukan Taliban mendominasi bagian selatan dan tengah negara. Aliansi Utara, meskipun tidak memiliki sumber daya yang cukup, berhasil mempertahankan kendali di sebagian besar wilayah utara dan membentuk garis pertahanan yang menjadi cikal bakal perlawanan yang lebih luas setelah intervensi militer internasional.

Dalam konteks ini, masa pemerintahan pertama Taliban dapat dipandang sebagai periode yang penuh dengan kontradiksi: di satu sisi, mereka mampu membawa stabilitas dalam bentuk penurunan tingkat kekerasan antar faksi, tetapi di sisi lain, mereka juga memaksakan ideologi yang sangat sempit dan menghancurkan berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi Afghanistan. Ketidakmampuan mereka untuk membuka

⁶⁹ Siti Hardiyanti, 'Kebijakan Militer Pemerintah Amerika Serikat Dalam Memerangi Kelompok Taliban Di Afghanistan Pada Kepemimpinan Barack Obama Periode 2009-2012', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3.1 (2018), pp. 1-39 <<http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/6009>>.

⁷⁰ Giustozzi, *Empires of Mud: Wars and Warlords in Afghanistan*.

dialog dengan masyarakat internasional dan untuk mengakomodasi keragaman etnis dan budaya di Afghanistan membuat mereka tidak memiliki fondasi yang kuat untuk membangun negara yang dapat diterima oleh semua pihak. Puncaknya adalah invasi militer Amerika Serikat yang mengakhiri pemerintahan Taliban pada tahun 2001, meskipun perang panjang dan konflik internal tetap berlanjut hingga hari ini.

2.2 Kondisi Politik Afghanistan Sebelum Munculnya Taliban

Sebelum kemunculan Taliban, Afghanistan merupakan negara yang berada dalam kondisi politik yang sangat tidak stabil akibat pergolakan ideologi, invasi asing, serta konflik berkepanjangan antar faksi lokal.⁷¹ Sejak kudeta komunis pada tahun 1978 yang dikenal dengan Revolusi Saur, pemerintahan Afghanistan mulai jatuh ke dalam pengaruh kuat ideologi Marxis-leninis yang diimpor dari Uni Soviet. Hal ini memicu perlawanan besar-besaran dari kelompok-kelompok Islam tradisional yang tidak menerima transformasi ideologi negara menjadi sistem ateistik-komunis. Perlawanan ini meningkat drastis setelah Uni Soviet secara langsung menginvasi Afghanistan pada Desember 1979 dengan tujuan untuk mempertahankan pemerintahan boneka komunis yang didirikan di Kabul. Intervensi tersebut justru menjadi titik awal dari konflik yang melibatkan banyak kekuatan asing, termasuk Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Pakistan, yang mendanai dan mempersenjatai para pejuang Mujahidin sebuah aliansi militan Islam yang berjuang untuk mengusir pasukan Soviet dari tanah Afghanistan.⁷²

Perlawanan Mujahidin terhadap pasukan Uni Soviet berlangsung selama hampir satu dekade, dan meskipun akhirnya Soviet menarik diri pada tahun 1989, kondisi politik

⁷¹ Maley, *Taliban Dan Multi Konflik Di Afghanistan*.

⁷² Durrotun Nafisah, 'Afghanistan Di Bawah Pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001 M'.

Afghanistan tidak lantas membaik. Kejatuhan pemerintahan komunis pimpinan Najibullah pada 1992 menyebabkan kekosongan kekuasaan, dan Afghanistan jatuh ke tangan para komandan Mujahidin. Namun, alih-alih membentuk pemerintahan bersama yang inklusif, para komandan ini terlibat dalam perebutan kekuasaan yang brutal. Faksi-faksi seperti Jamiat-e Islami, Hezb-e Islami, dan lainnya saling bertarung memperebutkan wilayah dan pengaruh, terutama di Kabul, sehingga menyebabkan kehancuran infrastruktur kota dan penderitaan luar biasa bagi rakyat sipil. Situasi ini memperlihatkan kegagalan elit Mujahidin dalam mengonsolidasikan kemenangan mereka menjadi pemerintahan yang stabil, serta memperkuat persepsi masyarakat bahwa para pejuang yang dulu dihormati kini berubah menjadi aktor-aktor kekuasaan yang korup dan haus kekuasaan.⁷³

Kondisi ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang semakin diperparah oleh melemahnya struktur negara, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap para pemimpin perang, dan meningkatnya tindakan kriminal seperti perampokan bersenjata, pemerkosaan, serta pengambilan paksa harta benda oleh milisi lokal.⁷⁴ Ketidakstabilan ini berlangsung hampir satu dekade setelah Soviet mundur, dan meskipun berbagai upaya untuk membentuk pemerintahan transisi dilakukan, tidak ada konsensus yang mampu menyatukan berbagai kelompok bersenjata. Afghanistan menjadi negara yang secara de facto terfragmentasi, dengan masing-masing wilayah dikuasai oleh panglima perang yang menerapkan hukum dan sistemnya sendiri. Dalam konteks inilah, masyarakat Afghanistan, khususnya masyarakat Pashtun di selatan, mulai merindukan hadirnya kekuatan baru yang

⁷³ V Ratriani, 'Sejarah Taliban Kelompok Yang Kini Menguasai Afghanistan', *Sejarah Taliban Kelompok Yang Kini Menguasai Afghanistan*, 2021 <<https://internasional.kontan.co.id/news/ini-sejarah-taliban-kelompok-yang-kini-menguasai-afghanistan-1>>.

⁷⁴ Larry Goodson, *Afghanistan's Endless War: State Failure, Regional Politics, and the Rise of the Taliban* (University of Washington Press, 2001).

mampu memberikan keamanan, ketertiban, dan keadilan, bahkan jika itu berarti menerima pemerintahan yang sangat konservatif secara ideologis.⁷⁵

Lebih jauh lagi, dalam kekacauan yang terus berlangsung, pengaruh asing terus memainkan peran di balik layar. Pakistan, sebagai negara tetangga yang memiliki kepentingan strategis di Afghanistan, terus memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok tertentu, termasuk para siswa madrasah (taliban) yang berasal dari kamp pengungsi Afghanistan di wilayah perbatasan. Pakistan melihat bahwa konflik berkepanjangan di Afghanistan dapat dimanfaatkan untuk membentuk pemerintahan yang bersahabat dan memprioritaskan kepentingan geopolitik Islamabad, terutama dalam konteks konflik mereka dengan India. Di sisi lain, Amerika Serikat, setelah keterlibatannya yang intensif selama era perang melawan Soviet, mulai menarik diri dari urusan Afghanistan pada awal 1990-an, meninggalkan kekosongan pengaruh yang kemudian diisi oleh kekuatan regional seperti Pakistan, Iran, dan Arab Saudi.

Masyarakat Afghanistan yang terjebak dalam kekacauan ini mengalami degradasi kualitas hidup secara drastis. Pendidikan runtuh, layanan kesehatan tidak tersedia, dan jalur ekonomi yang dulu berjalan kini lumpuh akibat konflik. Kabul, yang dulunya menjadi pusat intelektual dan kebudayaan, berubah menjadi medan perang yang porak-poranda. Anak-anak tumbuh dalam kondisi kelaparan dan ketakutan, sementara perempuan dipaksa untuk tetap tinggal di rumah karena tingginya risiko kekerasan di ruang publik. Ketika kepercayaan terhadap negara runtuh dan kelompok-kelompok Mujahidin terbukti tidak mampu menciptakan pemerintahan yang stabil, kehadiran kelompok baru yang

⁷⁵ Pardis & Harpviken, 'The Taliban in Power: Governance and the Prospects for Peace in Afghanistan', *Journal of Peace Research*, 2 (2021), pp. 197–213.

menjanjikan stabilitas berbasis hukum Islam justru dianggap sebagai harapan. Dalam konteks historis dan sosial inilah Taliban kemudian muncul bukan hanya sebagai gerakan keagamaan, tetapi juga sebagai alternatif politik dan sosial yang merespons kekosongan kekuasaan dan keinginan masyarakat akan ketertiban.

2.3 Fundamentalisme Deobandi dalam Akar Ideologis Taliban

Mazhab Deobandi merupakan salah satu mazhab pemikiran Islam Sunni yang berasal dari anak benua India dan memainkan peran penting dalam pembentukan ideologi dasar Gerakan Taliban.⁷⁶ Lahir pada tahun 1867 di kota Deoband, India Utara, sebagai respons terhadap kolonialisme Inggris, mazhab ini mengusung semangat revivalisme Islam yang memadukan keteguhan doktrin hukum Islam Hanafi dengan semangat purifikasi ajaran Islam dari unsur-unsur bid'ah⁷⁷, khurafat, dan pengaruh luar, terutama nilai-nilai sekularisme Barat.

Lembaga pendidikan tertua yang menjadi pusat penyebaran mazhab ini adalah *Darul Uloom Deoband*, sebuah madrasah Islam yang mengadopsi kurikulum berbasis pada kajian tafsir, hadis, fikih Hanafi, dan tasawuf, tetapi dengan penekanan pada aspek moral, disiplin hidup Islami, dan anti-modernisme. Paham ini kemudian menyebar ke wilayah Pakistan dan Afghanistan melalui jaringan madrasah serta diaspora ulama, terutama selama masa perlawanan terhadap kolonialisme dan kemudian pendudukan Soviet. Taliban, yang sebagian besar merupakan lulusan madrasah-madrasah beraliran

⁷⁶ Abdul Kabier Salehi, *An Inquiry Into Taliban Theology: Deobandism With A Pashtunwali Flavor*, 1st edn (Afghan Institute for Strategic Studies (AISS), 2024).

⁷⁷ Syekh. DR. Shaleh Al Fauzan, *BID'AH Pengertian, Macam Dan Hukumnya*, ed. by Lc. Zezen Zainal M (Daaiyah di Islamic Cultural Center (ICC)).

Deobandi di Pakistan, dengan kuat mengadopsi nilai-nilai dan pandangan dunia dari mazhab ini sebagai fondasi ideologi mereka.⁷⁸

Salah satu prinsip utama dalam ajaran Deobandi yang memengaruhi Taliban adalah semangat purifikasi Islam dan penolakan terhadap bentuk inovasi agama (*bid'ah*)⁷⁹, yang diterjemahkan Taliban dalam bentuk pelarangan budaya lokal, seni, musik, dan tradisi yang tidak secara eksplisit memiliki dasar dalam syariat. Deobandi menolak integrasi budaya pra-Islam ke dalam praktik keagamaan, dan memandang bahwa hanya hukum dan praktik Islam murni yang sah dan layak dipertahankan. Dalam praktik Taliban, prinsip ini diwujudkan dengan pelarangan terhadap festival lokal, penghancuran artefak sejarah seperti patung Buddha Bamiyan⁸⁰, serta penutupan institusi seni dan budaya. Taliban memandang simbol-simbol budaya yang berasal dari masa pra-Islam atau pengaruh asing sebagai bentuk kesyirikan yang harus diberantas. Dalam konteks inilah terlihat bagaimana ajaran Deobandi telah membentuk paradigma Taliban untuk menjadikan Islam versi mereka sebagai satu-satunya sumber hukum, moralitas, dan tatanan sosial, dengan menghapus keberagaman budaya yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Afghanistan⁸¹.

Mazhab Deobandi juga menekankan pada pentingnya sistem pendidikan berbasis madrasah yang konservatif, dengan fokus pada ilmu-ilmu agama, serta penolakan terhadap sistem pendidikan sekuler dan modern. Taliban menerapkan pendekatan ini dalam

⁷⁸ Muhammad Moj, 'Appendix II - Countercultural Exposition of the Deobandi Taliban. In The Deoband Madrassah Movement: Countercultural Trends and Tendencies', in *The Deoband Madrassah Movement Countercultural Trends and Tendencies* (Anthem Press, 2015), p. hal. 209–212.

⁷⁹ Fauzan, *BID'AH Pengertian, Macam Dan Hukumnya*.

⁸⁰ UNESCO, 'Commemorating 20 Years since the Destruction of Two Buddhas of Bamiyan, Afghanistan'.

⁸¹ Aly Ashghor, 'Taliban Di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan Dan Aliansinya Dengan Isis', *Jurnal Keamanan Nasional II*, 1 (2021), p. 71.

membangun sistem pendidikan mereka, terutama ketika mereka memerintah pada periode pertama (1996–2001). Di bawah kekuasaan Taliban, kurikulum sekolah umum digantikan oleh pelajaran fikih, tafsir, hadis, dan bahasa Arab yang diajarkan dengan pendekatan yang sangat literal. Pelajaran sains, matematika, atau ilmu sosial ditiadakan karena dianggap sebagai bentuk sekularisasi yang bertentangan dengan syariat. Sekolah-sekolah untuk anak perempuan ditutup, karena dalam tafsir Deobandi yang diadopsi oleh Taliban, perempuan dianggap lebih baik dididik di rumah, hanya untuk tujuan menjaga moralitas dan mempersiapkan diri sebagai istri dan ibu. Pendidikan bagi perempuan, jika pun diperbolehkan, dibatasi pada pengajaran dasar agama dan tata krama rumah tangga, itupun harus dalam pengawasan ketat dan tidak di luar rumah.⁸²

Dalam aspek politik dan pemerintahan, Deobandi memiliki pengaruh yang kompleks. Meskipun awalnya tidak secara eksplisit mendorong pembentukan negara Islam teokratis, doktrin Deobandi mendukung konsep kepemimpinan Islam yang moral dan menjunjung tinggi syariat. Taliban menerjemahkan hal ini dengan membentuk pemerintahan yang menolak sistem demokrasi dan menolak konsep hak asasi manusia universal, yang dianggap berasal dari filsafat Barat dan bertentangan dengan Islam.⁸³ Taliban mengembangkan sistem pemerintahan yang tidak mengenal pemilu, parlemen, atau sistem *checks and balances*. Sebaliknya, keputusan pemerintahan diambil oleh para ulama senior atau dewan syura yang semuanya laki-laki dan memiliki otoritas penuh atas interpretasi agama dan kebijakan publik. Dalam sistem ini, tidak ada pemisahan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, karena semua fungsi pemerintahan dijalankan

⁸² Moj, 'Appendix II - Countercultural Exposition of the Deobandi Taliban. In The Deoband Madrassah Movement: Countercultural Trends and Tendencies'.

⁸³ Durrotun Nafisah, 'Afghanistan Di Bawah Pemerintahan Taliban 1996-2001 M'.

dalam kerangka hukum Islam yang ditentukan oleh para ulama yang mengklaim legitimasi religius dari mazhab Deobandi.

Ajaran Deobandi juga sangat patriarkal dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat terhadap laki-laki. Perempuan dianggap sebagai penjaga kehormatan keluarga dan masyarakat, sehingga harus dilindungi dari ruang publik yang penuh fitnah. Taliban mengadopsi pandangan ini secara ekstrem, dengan melarang perempuan bekerja di luar rumah, bepergian tanpa mahram, atau tampil di media. Burqa menjadi pakaian wajib yang harus menutupi seluruh tubuh dan wajah perempuan. Bahkan, suara perempuan dianggap sebagai aurat yang tidak boleh didengar oleh laki-laki non-mahram. Ini semua merupakan pengejawantahan dari ajaran moral Deobandi yang diterjemahkan secara harfiah dan ekstrem oleh Taliban dalam konteks politik negara. Maka tidak mengherankan jika dalam semua kebijakan Taliban terkait perempuan, mulai dari pendidikan hingga pekerjaan, terdapat pola yang konsisten: pembatasan dan pengucilan perempuan dari ruang publik.⁸⁴

Pengaruh Deobandi juga terlihat dalam orientasi dakwah Taliban yang bercorak eksklusif dan mengutamakan *amar ma'ruf nahi munkar* secara koersif. Dalam praktiknya, Taliban membentuk satuan polisi syariah yang bertugas mengawasi perilaku masyarakat.⁸⁵ Ajaran moral seperti larangan berjudi, berzina, mencuri, atau tidak melaksanakan salat diberlakukan secara ketat, dan pelanggar dikenai sanksi fisik di muka umum. Konsep taubat dan pembinaan moral yang biasanya menjadi bagian dari tradisi Islam tasawuf

⁸⁴ Aly Ashghor, 'Taliban Di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan Dan Aliansinya Dengan ISIS', *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume VII (2021) <<https://ejurnal.uharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/download/1658/1292>>.

⁸⁵ John Butt, *The Propagation of Virtue and Prevention of Vice Law, Translated into English*, 2024 <<https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/political-landscape/the-propagation-of-virtue-and-prevention-of-vice-law-translated-into-english/>>.

justru diabaikan.⁸⁶ Taliban lebih memilih pendekatan hukum dan kekerasan fisik sebagai bentuk penegakan agama. Ini sejalan dengan semangat purifikasi dan legalisme fikih yang menjadi ciri khas pemikiran Deobandi. Dengan kata lain, ajaran mazhab Deobandi telah membentuk cara pandang Taliban bahwa dakwah bukan lagi sebatas penyampaian kebaikan, tetapi juga menjadi alat kontrol sosial dan legitimasi kekuasaan.

Sisi lain dari pengaruh Deobandi yang cukup penting adalah relasi internasionalnya.⁸⁷ Meskipun Deobandi sebagai mazhab awalnya tidak bersifat politik global, dalam konteks Pakistan dan Afghanistan, gerakan ini berkembang menjadi kekuatan transnasional dengan jaringan madrasah di berbagai negara. Di Pakistan, partai politik Jamiat *Ulema-e-Islam* (JUI) yang berhaluan Deobandi menjadi penyokong politik utama Taliban. Dengan dukungan ini, Taliban memperoleh akses terhadap rekrutmen, pendanaan, serta legitimasi keagamaan dari kelompok ulama lintas batas. Hubungan ini menunjukkan bahwa meskipun secara ideologi Taliban menolak tatanan dunia internasional yang sekuler, mereka tetap menjalin hubungan dengan jaringan Deobandi global untuk menopang keberlangsungan gerakan mereka. Hubungan ini memperkuat posisi Taliban tidak hanya sebagai kekuatan militer di Afghanistan, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan Islam konservatif yang tersebar di seluruh Asia Selatan dan bahkan Timur Tengah.⁸⁸

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa interpretasi Taliban terhadap Deobandi sering kali bersifat selektif dan ekstrem. Tidak semua pengikut Deobandi mendukung kekerasan atau bentuk kekuasaan otoriter. Di India, misalnya, banyak ulama

⁸⁶ Abdurrahman Mas'ud, *Menuju Paradigma Islam Humanis* (Gama Media, 2003).

⁸⁷ Ashghor, 'Taliban Di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan Dan Aliansinya Dengan Isis'.

⁸⁸ Moj, 'Appendix II - Countercultural Exposition of the Deobandi Taliban. In *The Deoband Madrassah Movement: Countercultural Trends and Tendencies*'.

Deobandi yang menolak radikalisme dan justru mempromosikan Islam sebagai agama damai. Bahkan di Pakistan sendiri, sebagian madrasah Deobandi tidak mengajarkan kekerasan, meskipun tetap memegang nilai-nilai konservatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Taliban telah melakukan simplifikasi dan radikalisasi terhadap ajaran Deobandi untuk mendukung kepentingan politik mereka. Mereka memilih elemen-elemen yang mendukung kontrol sosial, ketundukan perempuan, dan penolakan terhadap modernitas, sambil mengabaikan aspek spiritual dan moralitas yang sebenarnya menjadi bagian dari warisan Deobandi.⁸⁹

Pengaruh mazhab Deobandi terhadap Taliban tidak bisa direduksi sekadar sebagai hubungan ideologis pasif, melainkan sebagai fondasi utama yang membentuk karakter, struktur, serta arah kebijakan gerakan ini sejak awal pembentukannya hingga saat ini. Dalam setiap aspek mulai dari pendidikan, hukum, kebijakan gender, hingga struktur pemerintahan terlihat jelas bagaimana nilai-nilai Deobandi diadopsi dan diadaptasi oleh Taliban, meskipun dalam banyak hal mengalami distorsi dan penyimpangan yang menimbulkan kontroversi luas. Memahami pengaruh ini menjadi kunci untuk menganalisis pola kebijakan Taliban, baik di era pertama kekuasaan mereka maupun setelah mereka kembali ke tampuk pemerintahan pada tahun 2021.

2.4 Proksi Strategis Pakistan dalam Kemenangan Taliban

Dukungan Pakistan terhadap Taliban merupakan salah satu faktor paling krusial dalam membentuk dan mempertahankan eksistensi politik kelompok ini sejak awal kemunculannya hingga kembali berkuasa pada 2021. Keterlibatan Pakistan bukanlah

⁸⁹ Fatianda, 'Politik Islam Di Afghanistan: Studi Terhadap Kekuasaan Kelompok Taliban'.

sekadar ekspresi solidaritas ideologis, melainkan bagian dari kalkulasi strategis yang kompleks dan berlapis, yang berakar pada kepentingan geopolitik, pertimbangan keamanan domestik, serta dinamika politik internal Pakistan sendiri. Sejak dekade 1980-an, Pakistan telah memainkan peran sentral dalam mendukung perlawanan Mujahidin terhadap pendudukan Soviet di Afghanistan, dengan dukungan logistik dan finansial yang difasilitasi oleh CIA dan Arab Saudi.⁹⁰ Ketika Soviet mundur dan konflik antar faksi Mujahidin meluluhlantakkan Afghanistan, Pakistan merasa perlu membentuk dan mendukung kekuatan baru yang mampu menjamin stabilitas, melindungi kepentingan Pakistan di perbatasan barat, dan mengurangi pengaruh India. Dalam konteks inilah, Taliban muncul sebagai mitra strategis yang paling sesuai dengan agenda Pakistan.⁹¹

Salah satu bentuk dukungan paling nyata dari Pakistan terhadap Taliban adalah melalui institusi militernya, khususnya *Inter-Services Intelligence* (ISI), badan intelijen utama Pakistan yang memainkan peran operasional dalam pembentukan dan penguatan jaringan Taliban.⁹² ISI memberikan pelatihan militer, pendanaan, serta dukungan logistik kepada Taliban, terutama selama fase awal pembentukan gerakan ini pada 1994–1996. Pelatihan diberikan kepada para kombatan Taliban di kamp-kamp yang tersebar di wilayah perbatasan Pakistan-Afghanistan, seperti Quetta, Peshawar, dan Waziristan. Bantuan ini memungkinkan Taliban untuk tumbuh menjadi kekuatan militer yang tangguh dan berhasil merebut Kabul pada tahun 1996. Pakistan melihat bahwa dengan membantu Taliban, mereka tidak hanya memperoleh pengaruh politik di Afghanistan, tetapi juga

⁹⁰ Steve Coll, *Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001* (Penguin Press, 2004).

⁹¹ Human Rights Watch, *Crisis of Impunity - Pakistan's Support Of The Taliban*, 2001 <<https://www.hrw.org/reports/2001/afghan2/Afghan0701-02.htm>>.

⁹² Ahmed Rashid, *Descent into Chaos: The U.S. and the Disaster in Pakistan, Afghanistan, and Central Asia* (Viking, 2008).

menciptakan zona *buffer* terhadap potensi ekspansi pengaruh India di wilayah tersebut, khususnya di provinsi timur Afghanistan yang berbatasan langsung dengan wilayah sensitif Pakistan seperti Khyber Pakhtunkhwa dan Balochistan.

Dukungan Pakistan terhadap Taliban juga termanifestasi dalam penyediaan tempat aman (*safe haven*) bagi para pemimpin dan pejuang Taliban di wilayah Pakistan. Setelah kejatuhan pemerintahan Taliban akibat invasi Amerika Serikat pada tahun 2001, banyak tokoh utama Taliban melarikan diri ke Pakistan dan tinggal di kota-kota seperti Quetta, Karachi, dan Peshawar. Keberadaan mereka relatif tidak terganggu, bahkan dalam beberapa kasus dilaporkan mendapatkan perlindungan dari elemen-elemen tertentu dalam militer dan intelijen Pakistan. Fenomena ini dikenal luas dengan istilah “*Quetta Shura*”, yakni dewan kepemimpinan Taliban yang beroperasi dari kota Quetta, ibu kota provinsi Balochistan, Pakistan.⁹³ Keberadaan *Quetta Shura* memberikan ruang bagi Taliban untuk melakukan konsolidasi, rekrutmen, pelatihan, dan perencanaan strategi jangka panjang, hingga akhirnya mereka mampu kembali menguasai Afghanistan pada tahun 2021. Meski pemerintah Pakistan kerap membantah tuduhan ini, berbagai laporan dari lembaga internasional dan badan intelijen menyebutkan bahwa Pakistan memainkan peran aktif dan berkelanjutan dalam mendukung keberlangsungan Taliban sebagai kekuatan politik-militer.⁹⁴

Alasan strategis utama di balik dukungan Pakistan terhadap Taliban adalah keinginan Islamabad untuk menciptakan pemerintahan di Kabul yang bersahabat dan tidak memberi ruang bagi pengaruh India. Pakistan memandang Afghanistan sebagai “*strategic*

⁹³ Ibid

⁹⁴ Azis Rahmani, ‘Network Centric Warfare Dan Perang Asimetris Di Afghanistan’, *Jurnal Keamanan Nasional*, 4.2 (2018), pp. 165–210, doi:10.31599/jkn.v4i2.400.

depth” atau kedalaman strategis dalam konteks konflik jangka panjangnya dengan India. Pakistan khawatir bahwa pemerintahan Afghanistan yang terlalu dekat dengan India akan membuka kemungkinan pengepungan strategis (*encirclement*) terhadap Pakistan. Oleh karena itu, Taliban yang memiliki ikatan historis, etnis (Pashtun), dan ideologis dengan Pakistan dianggap sebagai sekutu ideal untuk menjamin kepentingan geopolitik Islamabad. Dengan Taliban berkuasa, Pakistan merasa dapat mengendalikan dinamika keamanan di perbatasan baratnya, mengurangi ketegangan domestik yang disebabkan oleh etnis Pashtun yang terpecah antara Pakistan dan Afghanistan, serta memperoleh akses ekonomi yang lebih besar ke Asia Tengah.

Namun, hubungan antara Pakistan dan Taliban tidak selalu berjalan harmonis. Meskipun Taliban banyak bergantung pada dukungan Pakistan, mereka juga memiliki agenda sendiri yang kadang bertentangan dengan kepentingan Islamabad. Misalnya, Taliban menolak secara eksplisit untuk mengakui perbatasan Durand Line garis batas yang memisahkan Afghanistan dan Pakistan yang ditetapkan oleh kolonial Inggris. Taliban, sebagaimana banyak orang Pashtun, memandang Durand Line sebagai batas buatan yang memecah etnis Pashtun dan tidak sah secara historis. Ketegangan juga muncul ketika Taliban Afghanistan tidak memberikan dukungan eksplisit terhadap Taliban Pakistan (*Tehrik-i-Taliban Pakistan/TTP*)⁹⁵, yang melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Pakistan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada hubungan erat, Taliban tetap merupakan entitas politik yang memiliki kehendak dan otonomi tersendiri, dan tidak sepenuhnya menjadi alat dari kepentingan Pakistan.

⁹⁵ Hassan Abbas, 'A Profile of Tehrik-i-Taliban Pakistan', in *CTC Sentinel* (Harvard Kennedy School Belfer Center for Science and International Affairs, 2008) <<https://www.belfercenter.org/publication/profile-tehrik-i-taliban-pakistan>> [accessed 1 July 2025].

Pakistan juga menghadapi tekanan internasional akibat dukungannya terhadap Taliban, terutama dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Selama dua dekade perang di Afghanistan, Pakistan memainkan peran ganda: di satu sisi, menjadi mitra penting dalam perang melawan terorisme dan menerima miliaran dolar bantuan militer dari Amerika; di sisi lain, menyediakan ruang aman dan dukungan tidak langsung kepada Taliban. Kebijakan ambivalen ini sering kali disebut sebagai bentuk “*strategic hedging*”, yaitu memelihara hubungan dengan semua pihak yang bertikai demi menjaga pengaruh. Meskipun kebijakan ini memberi Pakistan keuntungan jangka pendek, dalam jangka panjang menciptakan ketegangan diplomatik dan menurunkan kepercayaan dari mitra internasional, terutama Amerika Serikat, yang melihat Pakistan sebagai negara ambigu dalam komitmen terhadap pemberantasan ekstremisme.

Selain dimensi politik dan militer, dukungan Pakistan terhadap Taliban juga mencakup dimensi sosial dan kultural. Ribuan madrasah Deobandi di Pakistan menjadi basis utama kaderisasi ideologis Taliban. Madrasah-madrasah ini tidak hanya mengajarkan doktrin keagamaan konservatif, tetapi juga menyebarkan narasi perjuangan Islam, jihad, dan pentingnya penegakan syariat. Banyak dari madrasah tersebut dibiayai oleh jaringan donatur lokal maupun luar negeri, termasuk dari negara-negara Teluk. Kurikulum yang diajarkan sering kali tidak diawasi secara ketat oleh negara, sehingga berkembang menjadi ruang subversif bagi indoktrinasi ekstremisme. Generasi baru Taliban banyak direkrut dari madrasah-madrasah ini, sehingga menciptakan kesinambungan ideologis yang memungkinkan Taliban bertahan sebagai gerakan lintas generasi. Peran Pakistan dalam mencetak basis sosial Taliban melalui sektor pendidikan menjadikannya bukan hanya sekutu strategis, tetapi juga mitra ideologis.

Meskipun terdapat retorika bahwa Pakistan mendukung stabilitas regional dan menentang radikalisme, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Taliban tetap menjadi salah satu alat politik penting dalam strategi luar negeri Pakistan. Hal ini semakin jelas pasca-2021, ketika Taliban kembali menguasai Kabul. Pakistan termasuk negara pertama yang menjalin komunikasi resmi dan memberikan sinyal pengakuan, meskipun secara formal belum ada pengakuan diplomatik penuh. Dukungan ini mencerminkan keberlanjutan kepentingan Pakistan terhadap Afghanistan yang dikuasai Taliban. Namun demikian, muncul juga kekhawatiran di kalangan elite Pakistan bahwa Taliban yang terlalu kuat bisa menjadi bumerang, terutama jika mereka menginspirasi gerakan-gerakan radikal di dalam negeri Pakistan sendiri, seperti TTP yang telah beberapa kali melancarkan serangan besar terhadap militer dan warga sipil Pakistan.⁹⁶

Dengan demikian, hubungan antara Pakistan dan Taliban bersifat strategis, historis, dan ideologis, tetapi juga penuh ambiguitas dan potensi konflik. Pakistan membutuhkan Taliban untuk menjamin kepentingannya di Afghanistan, tetapi pada saat yang sama juga khawatir akan dampak radikalisme dan instabilitas yang mungkin dibawa oleh kekuasaan Taliban. Taliban sendiri menyadari bahwa dukungan Pakistan sangat vital, tetapi mereka juga berusaha menjaga jarak tertentu agar tidak kehilangan legitimasi nasional di mata rakyat Afghanistan yang tidak semuanya memandang Pakistan secara positif. Oleh karena itu, relasi ini bisa digambarkan sebagai simbiosis oportunistik, di mana kedua pihak saling membutuhkan tetapi juga saling mencurigai. Dalam konteks studi hubungan internasional, dinamika ini merupakan contoh nyata bagaimana negara

⁹⁶ United Nations, *TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)* <https://main.un.org/securitycouncil/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/tehrik-e-taliban-pakistan-%28ttp%29>.

dapat memanfaatkan aktor non-negara untuk mencapai tujuan strategisnya, namun pada saat yang sama berisiko menciptakan ketergantungan dan instabilitas jangka panjang.

2.5 Taliban 1.0 : Negara Teokratik yang Mengisolasi Diri (1996-2001)

2.5.1 Represi Sosial dalam Kebijakan Domestik Taliban Pertama

Pemerintahan Taliban pada era pertama (1996–2001) mencerminkan pendekatan otoritarian berbasis ideologi keagamaan yang ekstrem. Taliban menerapkan kebijakan politik domestik yang didasari oleh penafsiran ketat terhadap syariat Islam, khususnya yang bersumber dari pemikiran mazhab Deobandi.⁹⁷ Kebijakan ini bersifat sangat represif, dengan tujuan utama menciptakan masyarakat yang tunduk mutlak terhadap hukum Islam versi Taliban. Dalam praktiknya, hal ini diwujudkan dalam berbagai bentuk pembatasan terhadap hak individu, terutama perempuan, serta penghapusan kebebasan sipil dan politik. Pemerintahan Taliban tidak mengenal sistem demokrasi maupun partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Struktur kekuasaan sangat sentralistis, dengan Mullah Mohammad Omar sebagai *Amir al-Mu'minin*⁹⁸, yang memegang otoritas absolut atas urusan politik dan keagamaan.

Salah satu kebijakan paling kontroversial yang diterapkan oleh Taliban adalah larangan terhadap perempuan untuk bekerja, bersekolah, dan berpartisipasi dalam ruang publik. Perempuan diwajibkan mengenakan burqa dan tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa pendamping laki-laki (*mahram*). Kebijakan ini

⁹⁷ Ashghor, 'Taliban Di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan Dan Aliansinya Dengan ISIS'.

⁹⁸ NU Online, 'Amirul Mukminin Sang Penakluk', *Taushyiah*, 2022 <[https://jabar.nu.or.id/taushiyah/Amirul Mukminin Sang Penakluk-W71xB](https://jabar.nu.or.id/taushiyah/Amirul%20Mukminin%20Sang%20Penakluk-W71xB)> [accessed 9 July 2024].

bukan hanya berdampak pada hilangnya akses pendidikan dan pekerjaan bagi setengah populasi Afghanistan, tetapi juga menghancurkan struktur sosial dan ekonomi yang bergantung pada peran perempuan.⁹⁹ Di banyak wilayah, sekolah-sekolah perempuan ditutup, dokter perempuan diberhentikan, dan seluruh lembaga yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dibubarkan atau digantikan oleh aparat moral Taliban.

Kebebasan berekspresi dan beragama juga diberangus. Taliban menutup media-media independen dan melarang segala bentuk hiburan publik yang dianggap tidak Islami, seperti musik, film, dan televisi. Aparat polisi moral (*Amr bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar*)¹⁰⁰ dibentuk untuk memantau perilaku warga, mengatur cara berpakaian, dan memaksa masyarakat mematuhi waktu salat dengan cara menutup toko-toko saat waktu salat tiba. Pengawasan yang ketat ini menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat, menciptakan suasana politik yang represif dan menutup ruang untuk kebebasan berekspresi atau kritik terhadap pemerintah.

Taliban juga menerapkan sistem hukum yang ekstrem dengan hukuman-hukuman fisik sebagai bentuk penegakan hukum syariat. Hukuman rajam, amputasi, dan eksekusi publik menjadi bagian dari kebijakan hukum Taliban yang dipertontonkan secara terbuka di lapangan-lapangan umum. Kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan efek jera, namun justru memperlihatkan kekejaman pemerintahan dan melanggengkan budaya kekerasan. Para pelaku pencurian

⁹⁹ Human Rights Watch, *Afghanistan: Year of Taliban Rule --- Repression of Women, Girls, Media, and Dissent*.

¹⁰⁰ Butt, *The Propagation of Virtue and Prevention of Vice Law, Translated into English*.

dihukum potong tangan, sementara pelaku perzinahan dan pembunuhan dieksekusi tanpa proses hukum yang transparan.

Sistem pendidikan pun mengalami perubahan drastis. Taliban menghapus pelajaran-pelajaran yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam versi mereka, seperti sains modern dan ilmu sosial Barat. Sekolah-sekolah dipaksa untuk menyesuaikan kurikulum yang hanya memuat pelajaran agama, khususnya fikih dan tafsir berdasarkan mazhab Deobandi. Pendidikan hanya diperuntukkan bagi laki-laki, dan bahkan untuk mereka, pembatasan materi tetap diberlakukan dengan ketat. Hal ini menyebabkan generasi muda Afghanistan kehilangan akses terhadap pendidikan yang komprehensif dan berkualitas.¹⁰¹

Administrasi pemerintahan berjalan secara tidak profesional dan sangat dipengaruhi oleh struktur militer dan agama.¹⁰² Tidak ada sistem birokrasi yang mapan, dan banyak jabatan pemerintahan diisi oleh tokoh-tokoh agama yang tidak memiliki latar belakang dalam pengelolaan negara. Keputusan politik dan kebijakan publik dibuat secara sepihak oleh otoritas pusat tanpa konsultasi dengan masyarakat atau pemangku kepentingan lain. Dalam situasi ini, kebijakan domestik Taliban hanya mencerminkan kehendak elite Taliban tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas.

Pemerintahan Taliban juga menolak sistem peradilan modern dan menggantikannya dengan pengadilan syariat yang dipimpin oleh ulama-ulama mereka. Proses pengadilan berlangsung tanpa transparansi, dan terdakwa tidak

¹⁰¹ Salehi, *An Inquiry Into Taliban Theology: Deobandism With A Pashtunwali Flavor*.

¹⁰² *Ibid.*

memiliki hak pembelaan. Keputusan hukum bersifat final dan langsung dieksekusi, sering kali tanpa bukti yang memadai. Sistem hukum ini menambah ketakutan masyarakat terhadap pemerintahan Taliban dan memperkuat citra mereka sebagai pemerintahan teokratis otoriter.

Selain itu, Taliban melakukan pemusnahan terhadap artefak-artefak budaya yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti patung Buddha Bamiyan yang dihancurkan pada tahun 2001.¹⁰³ Tindakan ini mendapat kecaman keras dari masyarakat internasional dan dianggap sebagai kejahatan terhadap warisan budaya dunia. Hal ini menegaskan bahwa Taliban bukan hanya menolak modernitas dan pluralisme, tetapi juga berusaha menghapus sejarah yang tidak sesuai dengan narasi ideologis mereka.

Secara keseluruhan, kebijakan politik domestik Taliban pada Era pertama membentuk sebuah sistem pemerintahan yang tertutup, represif, dan sangat tidak inklusif. Era ini menggunakan ideologi agama sebagai alat untuk mengontrol masyarakat secara total, tanpa memberikan ruang bagi partisipasi politik, kebebasan berpendapat, maupun keberagaman.¹⁰⁴ Pendekatan ekstrem ini tidak hanya menciptakan ketakutan, tetapi juga memperparah krisis sosial dan ekonomi yang sudah berlangsung sejak dekade sebelumnya. Dampaknya masih terasa hingga kini, terutama dalam bentuk keterbelakangan pendidikan, rendahnya indeks pembangunan manusia, dan trauma sosial di kalangan masyarakat Afghanistan.

¹⁰³ UNESCO, 'Commemorating 20 Years since the Destruction of Two Buddhas of Bamiyan, Afghanistan'.

¹⁰⁴ Salehi, *An Inquiry Into Taliban Theology: Deobandism With A Pashtunwali Flavor*.

2.5.2 Isolasionisme dalam Hubungan Luar Negeri Era Pertama

Pemerintahan Taliban pertama (1996–2001) memiliki posisi yang sangat lemah dalam tatanan hubungan internasional. Hanya tiga negara yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban, yaitu Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Sementara mayoritas negara lain, terutama dari blok Barat dan organisasi internasional seperti PBB, menolak mengakui Taliban sebagai pemerintahan sah Afghanistan.¹⁰⁵ Hal ini disebabkan oleh kebijakan represif Taliban di dalam negeri serta hubungan mereka dengan kelompok teroris internasional, khususnya Al-Qaeda. Isolasi internasional ini menyebabkan Taliban kehilangan legitimasi global dan akses terhadap bantuan ekonomi serta dukungan diplomatik yang penting untuk keberlangsungan negara.¹⁰⁶

Dukungan Pakistan terhadap Taliban lebih dari sekadar pengakuan diplomatik. Pakistan menyediakan pelatihan militer, logistik, dan perlindungan diplomatik bagi para pemimpin Taliban. Hubungan ini didasari oleh kepentingan strategis Islamabad untuk menciptakan pemerintahan proksi di Afghanistan yang dapat menyeimbangkan pengaruh India di kawasan. Pakistan juga melihat Taliban sebagai alat untuk menjaga “*strategic depth*” terhadap ancaman dari barat. Namun, dukungan ini menyebabkan ketegangan dengan India dan memperburuk citra Taliban di mata internasional, karena dianggap sebagai kepanjangan tangan dari kepentingan Pakistan.¹⁰⁷

¹⁰⁵ M. Nur Rokhman, ‘Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Taliban Di Afghanistan (1996-2001)’.

¹⁰⁶ Rashid, *Descent into Chaos: The U.S. and the Disaster in Pakistan, Afghanistan, and Central Asia*.

¹⁰⁷ Human Rights Watch, *Crisis of Impunity - Pakistan’s Support Of The Taliban*.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memberikan dukungan dalam bentuk pengakuan politik dan bantuan ekonomi terbatas. Dukungan ini didorong oleh solidaritas keislaman serta keinginan untuk memengaruhi arah ideologis pemerintahan Taliban. Namun, kedua negara tersebut tidak dapat mengimbangi tekanan global yang meningkat terhadap Taliban, terutama setelah terbongkarnya hubungan erat mereka dengan Al-Qaeda. Pengaruh negara-negara Teluk terhadap kebijakan Taliban pun terbatas, karena Taliban sangat menekankan kedaulatan dalam menjalankan syariat Islam versi mereka sendiri.

Posisi Taliban di forum internasional sangat marginal. Tidak ada perwakilan resmi yang diakui di PBB maupun organisasi internasional lainnya.¹⁰⁸ Isolasi ini menyebabkan Afghanistan di bawah Taliban terputus dari sistem internasional, tidak dapat mengakses bantuan kemanusiaan secara formal, dan sangat tergantung pada jaringan informal atau bantuan dari negara-negara sekutu. Akibatnya, rakyat Afghanistan menjadi korban dari kebijakan luar negeri Taliban yang tidak memperhatikan prinsip diplomasi multilateral dan keterlibatan internasional.

Salah satu titik balik dalam hubungan internasional Taliban adalah perlindungan yang mereka berikan kepada Osama bin Laden dan jaringan Al-Qaeda. Setelah serangan terhadap kedutaan besar AS di Kenya dan Tanzania pada 1998,¹⁰⁹ serta semakin meningkatnya aktivitas terorisme global yang terkait dengan Al-Qaeda, Taliban mendapat tekanan keras dari Amerika Serikat untuk

¹⁰⁸ United Nations, 'Security Council Committee Pursuant to Resolutions 1267 (1999) 1989 (2011) and 2253 (2015) Concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da'esh), Al-Qaida and Associated Individuals, Groups, Undertakings and Entities', *ISIL (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions Committee*, 1999 <<https://main.un.org/securitycouncil/en/sanctions/1267>> [accessed 25 April 2025].

¹⁰⁹ FBI, East African Embassy Bombings <<https://www.fbi.gov/history/famous-cases/east-african-embassy-bombings>>.

menyerahkan Osama bin Laden. Taliban menolak, dengan alasan bahwa Osama adalah tamu mereka dan tunduk pada hukum Islam tentang perlindungan tamu. Penolakan ini menegaskan bahwa Taliban lebih memprioritaskan solidaritas ideologis dengan sesama Islamis daripada kalkulasi diplomasi internasional.

Penolakan untuk mengekstradisi Osama bin Laden memicu pemberlakuan sanksi ekonomi dan embargo diplomatik oleh Dewan Keamanan PBB. Pada tahun 1999, Resolusi DK PBB No. 1267 diberlakukan, yang membekukan aset-aset Taliban di luar negeri dan melarang penerbangan internasional dari dan ke Afghanistan.¹¹⁰ Sanksi ini memperparah krisis ekonomi di dalam negeri dan semakin memperlemah posisi Taliban secara politik di mata dunia. Afghanistan menjadi negara yang terisolasi, tanpa akses terhadap forum internasional atau bantuan kemanusiaan yang efektif.

Strategi luar negeri Taliban juga sangat terbatas pada narasi ideologis dan tidak memiliki pendekatan pragmatis yang dapat mengundang simpati atau kerjasama internasional. Ketika negara-negara lain berupaya menyeimbangkan ideologi dan kepentingan strategis, Taliban justru menutup diri dari proses negosiasi dan kerjasama global. Bahkan dalam konteks bantuan kemanusiaan, Taliban kerap mempersulit akses organisasi internasional dengan dalih menjaga kesucian syariat Islam di wilayah mereka. Ini semakin memperburuk krisis kemanusiaan di Afghanistan.¹¹¹

¹¹⁰ Nations, 'Security Council Committee Pursuant to Resolutions 1267 (1999) 1989 (2011) and 2253 (2015) Concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da'esh), Al-Qaida and Associated Individuals, Groups, Undertakings and Entities'.

¹¹¹ Human Rights Watch, *Crisis of Impunity - Pakistan's Support Of The Taliban*.

Kegagalan Taliban membangun hubungan internasional yang produktif menjadi salah satu penyebab utama runtuhnya Pemerintahan mereka. Ketika Amerika Serikat meluncurkan *Operasi Enduring Freedom* pasca serangan 11 September 2001, tidak ada satu pun negara besar yang memberikan dukungan kepada Taliban. Bahkan sekutu-sekutu lamanya seperti Arab Saudi dan Pakistan menekan Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden demi menghindari invasi militer. Keteguhan Taliban untuk mempertahankan loyalitas kepada Al-Qaeda justru menjadi bumerang yang mengakhiri kekuasaan mereka di kancah politik internasional.¹¹²

Dengan demikian, kebijakan hubungan internasional Taliban pada Era pertama bersifat konfrontatif, ideologis, dan anti-diplomatik. Mereka menutup diri dari komunitas global, gagal menjalin hubungan bilateral maupun multilateral yang konstruktif, serta memilih jalur isolasionis yang sangat merugikan rakyat Afghanistan. Ketidaksanggupan mereka untuk menavigasi sistem politik global modern menciptakan kerentanan strategis yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk menggulingkan pemerintahan Taliban dari tampuk kekuasaan pada akhir tahun 2001.¹¹³

¹¹² on Terrorist Attacks Upon the United States, 'The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States'.

¹¹³ M. Nur Rokhman, 'Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Taliban Di Afghanistan (1996-2001)'.

2.6 Transisi Kekuasaan : Taliban di Tengah Fragmentasi Afghanistan

2.6.1 Gerakan Perlawanan dan Reorganisasi Pasca 2001

Periode antara jatuhnya Taliban dari tampuk kekuasaan pada tahun 2001 dan kebangkitan mereka kembali pada 2021 merupakan fase penting yang membentuk karakter serta strategi politik Taliban di era berikutnya. Setelah digulingkan oleh invasi militer pimpinan Amerika Serikat dalam rangka *Operasi Enduring Freedom*, Taliban tidak benar-benar lenyap dari peta politik Afghanistan. Sebaliknya, mereka segera memulai proses regrouping, menyusun kembali kekuatan, dan menjalankan perang gerilya terhadap pasukan koalisi dan pemerintah Afghanistan yang didukung Barat. Periode ini, yang berlangsung selama hampir dua dekade, menjadi saksi transformasi Taliban dari sebuah rezim yang runtuh menjadi gerakan pemberontakan yang berhasil mengembalikannya atas Afghanistan.¹¹⁴

Salah satu strategi awal Taliban dalam masa ini adalah memanfaatkan jaringan sosial, ideologis, dan geografis yang sudah terbentuk selama masa pemerintahan pertama mereka. Dukungan dari komunitas Pashtun di wilayah perbatasan selatan Afghanistan dan Pakistan tetap kuat, terutama karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan baru di Kabul yang dianggap korup, elitis, dan terlalu bergantung pada kekuatan asing. Taliban memanfaatkan celah ini untuk menyebarkan narasi bahwa mereka adalah kekuatan yang sah untuk

¹¹⁴ Rafiuddin Najam, 'The Taliban's Return to Power: An Empirical Analysis of the Afghan Peace Negotiations of 2018–2020', *Defence and Peace Economics*, 35 (2024) <<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10242694.2023.2285461>>.

memerdekakan Afghanistan dari pendudukan asing, sekaligus sebagai penjaga syariat Islam sejati.

Taliban juga mendapatkan keuntungan besar dari situasi politik dan keamanan yang terus memburuk di Afghanistan pasca 2001. Pemerintahan baru yang dibentuk di bawah Presiden Hamid Karzai, dan kemudian Ashraf Ghani, gagal membangun legitimasi yang kuat di mata masyarakat luas. Korupsi merajalela, distribusi pembangunan tidak merata, dan ketimpangan sosial semakin tajam. Selain itu, kehadiran pasukan asing dalam jumlah besar menciptakan resistensi di banyak daerah, yang justru membuka ruang bagi Taliban untuk merebut kembali simpati rakyat melalui operasi-operasi militer terbatas, kampanye propaganda, dan program bantuan sosial alternatif di wilayah yang mereka kuasai.

Di sisi militer, Taliban mengadopsi strategi perang asimetris dengan mengandalkan taktik gerilya, serangan bom bunuh diri, dan infiltrasi ke dalam institusi-institusi pemerintahan. Mereka juga memanfaatkan kondisi medan pegunungan yang sulit dijangkau oleh militer konvensional untuk mempertahankan basis-basis utama mereka. Seiring waktu, Taliban menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa dalam memodifikasi strategi mereka sesuai dengan dinamika medan tempur dan tekanan militer dari koalisi internasional.¹¹⁵

Selain kekuatan militer, Taliban juga mulai menunjukkan kematangan politik dengan membentuk struktur pemerintahan bayangan di daerah-daerah yang mereka kuasai. Struktur ini mencakup sistem peradilan berdasarkan syariah, lembaga pemungut pajak, hingga pengaturan pendidikan dan pelayanan kesehatan

¹¹⁵ Rahmani, 'Network Centric Warfare Dan Perang Asimetris Di Afghanistan'.

dasar. Pemerintahan bayangan ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat kendali Taliban di daerah pedesaan dan membangun legitimasi alternatif terhadap pemerintahan pusat di Kabul. Warga di banyak desa lebih memilih pengadilan Taliban yang dianggap cepat dan bersih dari korupsi, dibandingkan sistem peradilan resmi yang lamban dan rawan suap.

Hubungan Taliban dengan negara-negara luar juga mulai mengalami pergeseran selama periode ini. Meskipun tidak mendapatkan pengakuan resmi dari negara manapun, Taliban mulai membuka saluran komunikasi informal dengan berbagai pihak, termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok.¹¹⁶ Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan legitimasi politik dan menunjukkan bahwa mereka adalah aktor politik yang tidak bisa diabaikan dalam proses perdamaian Afghanistan. Langkah diplomatik ini mencapai puncaknya pada perjanjian Doha tahun 2020¹¹⁷, di mana Amerika Serikat dan Taliban menandatangani kesepakatan yang membuka jalan bagi penarikan pasukan asing dan membuka ruang bagi Taliban untuk kembali ke arena politik nasional.

Selama masa transisi ini, Taliban juga melakukan reformasi citra secara bertahap. Mereka menyadari bahwa untuk memperoleh kembali kekuasaan di era globalisasi, mereka harus menunjukkan fleksibilitas tertentu dalam kebijakan dan wacana publik. Meskipun pada praktiknya nilai-nilai inti mereka tidak banyak

¹¹⁶ M Bazwan, 'Balancing Interests: China's Pragmatic Engagement with Post-Withdrawal Afghanistan', *ResearchGate*, 2023 <https://www.researchgate.net/publication/378496245_Balancing_Interests_China%27s_Pragmatic_Engagement_with_Post-withdrawal_Afghanistan>.

¹¹⁷ Asep Kamaluddin Nasir Ali Zhafir Talmullah, Mansur, Dairatul Ma'arif, 'Realisasi Perjanjian Perdamaian Doha Dialogue Antara Afghanistan-Amerika Serikat Dan Taliban Periode Kepemimpinan Ashraf Ghani', *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta*, Volume 2, (2022), pp. 94–104.

berubah, Taliban mulai menampilkan wajah yang lebih moderat di media internasional, berbicara tentang pentingnya pendidikan, dialog, dan keterlibatan politik. Strategi pencitraan ini berhasil dalam membentuk persepsi bahwa Taliban versi baru lebih pragmatis dibandingkan sebelumnya, meskipun banyak pihak skeptis melihat hal itu hanya sebagai taktik sementara.

Namun, tidak semua elemen dalam tubuh Taliban mendukung arah reformasi ini. Perpecahan internal mulai muncul antara kelompok yang lebih pragmatis dan kelompok ultrakonservatif yang menolak kompromi dengan pihak asing.¹¹⁸ Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika kompleks dalam tubuh Taliban, yang tidak lagi merupakan kelompok homogen seperti pada era pertama. Friksi internal ini sempat menimbulkan konflik horizontal dan penurunan efektivitas operasional, namun secara umum tidak sampai menghancurkan struktur organisasi mereka secara keseluruhan.

Faktor eksternal juga sangat menentukan dinamika Taliban pada periode ini. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, meningkatnya pengaruh Rusia di Asia Tengah, serta kebangkitan kekuatan Tiongkok sebagai aktor global memberikan peluang baru bagi Taliban untuk memainkan peran geopolitik. Mereka berusaha mengambil keuntungan dari rivalitas kekuatan besar dengan menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang di kawasan. Ini terbukti ketika Taliban secara aktif

¹¹⁸ United Nations Assistance Mission in Afghanistan, *Human Rights Situation in Afghanistan (January–March 2025)*, 2025 <<https://8am.media/eng/unama-report-taliban-intensify-crackdown-on-fundamental-freedoms-and-womens-rights/>>.

membuka dialog dengan utusan Tiongkok dan Rusia serta menjalin komunikasi dengan Iran, meskipun hubungan historis mereka sebelumnya sempat tegang.¹¹⁹

Kebangkitan kembali Taliban pada tahun 2021, yang ditandai dengan pengambilalihan Kabul secara damai setelah penarikan pasukan Amerika Serikat, merupakan klimaks dari strategi jangka panjang yang mereka bangun selama dua dekade.¹²⁰ Keberhasilan ini bukan semata karena kekuatan militer Taliban, tetapi lebih karena kegagalan pemerintah Afghanistan dalam membangun fondasi negara yang kuat dan inklusif. Taliban berhasil menempatkan diri sebagai alternatif yang dianggap mampu mengembalikan stabilitas, walaupun dengan harga ideologi konservatif yang tinggi. Dengan demikian, periode antara dua Era ini menjadi bukti transformasi Taliban dari kelompok militan menjadi aktor politik yang matang secara strategis.

2.6.2 Perang Bayangan dan Rivalitas Antar-Kelompok

Perjalanan kekuasaan Taliban di Afghanistan tidak dapat dilepaskan dari dinamika konflik internal maupun eksternal yang membentuk struktur politik negara tersebut, serta peran signifikan dari kelompok-kelompok lain di sekitarnya. Sejak awal kemunculannya, Taliban tumbuh dalam konteks Afghanistan yang sarat konflik berkepanjangan, dimulai dari invasi Uni Soviet pada 1979, perang saudara antar faksi Mujahidin setelah 1992, hingga intervensi militer Amerika Serikat pasca

¹¹⁹ F Solhdoost, 'Iran's Machiavellian Pragmatism in Dealing with Afghanistan's Taliban', *Iranian Review of Foreign Affairs*, 14.1 (2023), pp. 33–58.

¹²⁰ Ali Zhafir Talmullah, Mansur, Dairatul Ma'arif, 'Realisasi Perjanjian Perdamaian Doha Dialogue Antara Afghanistan-Amerika Serikat Dan Taliban Periode Kepemimpinan Ashraf Ghani'.

serangan 11 September 2001¹²¹. Situasi ini menciptakan ruang kosong kekuasaan yang memungkinkan Taliban hadir sebagai kekuatan yang menjanjikan stabilitas di tengah kekacauan. Namun, konflik yang berlarut-larut itu juga menandai perjalanan Taliban dengan perlawanan yang tidak pernah sepenuhnya surut, baik dari dalam negeri maupun dari berbagai aktor luar.

Secara internal, kelompok-kelompok oposisi seperti Aliansi Utara memainkan peran penting dalam menentang dominasi Taliban, terutama selama periode pemerintahan mereka yang pertama (1996–2001)¹²². Aliansi ini, yang terdiri dari berbagai etnis non-Pashtun seperti Tajik, Hazara, dan Uzbek, menolak kebijakan Taliban yang dianggap diskriminatif dan sentralistik berbasis etnis Pashtun. Perlawanan dari kelompok ini tetap konsisten bahkan setelah jatuhnya Kabul ke tangan Taliban, dan menjadi mitra utama Amerika Serikat saat melancarkan invasi militer pada tahun 2001¹²³. Perlawanan dari Aliansi Utara bukan hanya berbentuk militer, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi ideologi konservatif Taliban yang mengekang keberagaman dan kebebasan sipil.

Sementara itu, secara eksternal, peran kelompok-kelompok jihad global seperti Al-Qaeda memberikan warna tersendiri dalam dinamika Taliban.¹²⁴ Hubungan erat antara Taliban dan Al-Qaeda, terutama pada masa pemerintahan pertama, telah membawa dampak geopolitik yang sangat besar. Perlindungan

¹²¹ on Terrorist Attacks Upon the United States, 'The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States'.

¹²² Goodson, *Afghanistan's Endless War: State Failure, Regional Politics, and the Rise of the Taliban*.

¹²³ on Terrorist Attacks Upon the United States, 'The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States'.

¹²⁴ Aly Ashghor, 'Taliban Di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan Dan Aliansinya Dengan ISIS (Taliban in Afghanistan: Overview of Its Ideology, Movement and Alliance with ISIS)', *Jurnal Keamanan Nasional*, 7.1 (2021), pp. 71–83.

Taliban terhadap Osama bin Laden tidak hanya menjadi alasan invasi militer Amerika Serikat, tetapi juga memperkuat persepsi internasional bahwa Taliban merupakan bagian dari jaringan terorisme global.¹²⁵ Kolaborasi ini memberi Taliban dukungan logistik dan ideologis, namun sekaligus menjadikan mereka sasaran utama dalam perang global melawan terorisme. Di sisi lain, dalam periode kedua kekuasaannya (2021–sekarang), Taliban berusaha mengambil jarak secara retorik dari kelompok jihad internasional untuk memperoleh legitimasi global, meskipun laporan intelijen menyebutkan bahwa hubungan informal dan kedekatan ideologis tetap ada.

Selain Al-Qaeda, kelompok-kelompok lain seperti *Islamic State Khorasan Province* (ISIS-K) juga turut mempengaruhi dinamika politik Taliban, terutama pada era kekuasaan kedua.¹²⁶ ISIS-K memosisikan diri sebagai musuh ideologis Taliban dan melakukan serangkaian serangan terhadap warga sipil maupun pasukan Taliban. Rivalitas antara kedua kelompok ini menunjukkan adanya fragmentasi dalam tubuh gerakan Islam radikal di Afghanistan, di mana Taliban dipandang oleh ISIS-K sebagai terlalu kompromistis dan nasionalistis. Ketegangan ini tidak hanya mempersulit Taliban dalam mengkonsolidasikan kekuasaan, tetapi juga memperburuk situasi keamanan domestik yang sudah rapuh pasca penarikan pasukan Amerika dan NATO.

Konflik di Afghanistan juga tidak terlepas dari peran negara-negara regional, khususnya Pakistan dan Iran. Pakistan sejak awal menjadi pendukung

¹²⁵ Coll, *Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001*.

¹²⁶ Nations, *TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)*.

utama Taliban melalui bantuan logistik, pelatihan, dan perlindungan di wilayah perbatasannya.¹²⁷ Peran strategis Pakistan menjadikan Taliban sebagai alat untuk mengamankan kepentingannya terhadap India dan menciptakan kedalaman strategis di barat. Di sisi lain, Iran yang mayoritas Syiah¹²⁸ bersikap antagonistik terhadap Taliban yang berhaluan Sunni ekstrem.¹²⁹ Namun, dinamika ini berubah secara pragmatis pada Era kedua, ketika Iran menunjukkan kehati-hatian sekaligus upaya membina hubungan taktis dengan Taliban untuk menahan pengaruh ISIS-K dan menjaga stabilitas perbatasan. Negara-negara lain seperti Cina dan Rusia juga terlibat dalam kalkulasi strategis terhadap Taliban, baik sebagai ancaman maupun mitra potensial dalam pengendalian keamanan regional dan perdagangan narkotika.¹³⁰

Dengan demikian, kekuatan politik Taliban tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berinteraksi, berkonflik, dan beradaptasi dengan kekuatan lain yang turut membentuk lanskap politik Afghanistan. Dari faksi-faksi lokal yang menjadi lawan militer, hingga kelompok jihad transnasional dan negara-negara berkepentingan, semua memainkan peran dalam menentukan arah perkembangan Taliban dari masa ke masa.

¹²⁷ International Crisis Group, *The Future of Taliban-Pakistan Relations: Managing Border Tensions*, 2023.

¹²⁸ Gonda Yumitro, 'PENGARUH PEMIKIRAN DAN GERAKAN POLITIK SYIAH IRAN DI INDONESIA', *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, Vol. 2, No (2017), pp. 237–58.

¹²⁹ Solhdoost, 'Iran's Machiavellian Pragmatism in Dealing with Afghanistan's Taliban'.

¹³⁰ Widiastutie, 'Hubungan Cina-Rusia Dalam Dinamika Geopolitik Kawasan Asia Tengah'.

2.7 Taliban 2.0 : Kembalinya Otoritarian dalam Format Baru

2.7.1 Faktor Internasional dan Lokal dalam Kebangkitan Taliban Kedua

Kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada tahun 2021 menandai babak baru dalam sejarah politik Afghanistan. Setelah dua dekade berperang melawan pasukan Amerika Serikat, NATO, serta pemerintah Afghanistan yang didukung Barat, Taliban akhirnya berhasil merebut kembali Kabul pada 15 Agustus 2021.¹³¹ Kebangkitan ini bukan sekadar hasil dari kekuatan militer semata, tetapi juga merupakan akumulasi dari ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan sebelumnya, kegagalan negara dalam menciptakan stabilitas, serta kegagalan strategi militer dan diplomatik Amerika Serikat yang terlalu bergantung pada elit-elit politik Afghanistan yang korup dan tidak populer. Proses ini menunjukkan bahwa Taliban mampu memanfaatkan ketidakstabilan politik dan sosial sebagai peluang untuk kembali menawarkan dirinya sebagai kekuatan alternatif yang menjanjikan keamanan dan keteraturan meskipun dengan harga pengorbanan kebebasan sipil dan hak asasi manusia.¹³²

Keberhasilan Taliban dalam menguasai kembali Afghanistan juga didorong oleh strategi jangka panjang mereka yang cermat. Selama dua dekade pasca tergulingnya pada 2001, Taliban menjalankan operasi gerilya yang efektif di pedesaan, sambil secara perlahan membangun jaringan pemerintahan bayangan di wilayah-wilayah yang gagal dijangkau oleh pemerintah pusat.¹³³ Mereka menggalang dukungan dari masyarakat lokal, sering kali dengan memberikan

¹³¹ Khalid, 'Taliban Politics'.

¹³² Paisuly, 'Taliban Merebut Kembali Kekuasaan Di Afghanistan'.

¹³³ *Ibid.*

bentuk-bentuk peradilan cepat berdasarkan hukum Islam yang dianggap lebih adil ketimbang sistem peradilan negara yang lamban dan korup. Di sisi lain, mereka juga memanfaatkan narasi nasionalisme keislaman untuk mengancam kehadiran asing sebagai bentuk penjajahan modern. Pendekatan ini, meskipun bersifat ideologis, dikemas dalam bentuk retorika keadilan sosial dan kedaulatan nasional, yang resonan bagi banyak warga Afghanistan yang menderita akibat intervensi asing.

Faktor penting lain dalam kebangkitan Taliban adalah proses penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO, yang dipercepat sejak kesepakatan Doha pada Februari 2020 antara AS dan Taliban.¹³⁴ Dalam kesepakatan tersebut, Taliban berjanji tidak akan menyerang pasukan asing dan akan melakukan negosiasi damai dengan pemerintah Afghanistan. Namun, dalam kenyataannya, Taliban memanfaatkan proses ini sebagai ruang manuver untuk memperluas pengaruh militer dan politik mereka di berbagai provinsi. Ketika akhirnya Amerika dan sekutunya mulai mundur secara penuh pada pertengahan 2021, Taliban bergerak dengan kecepatan tinggi, mengambil alih kota-kota besar tanpa perlawanan berarti karena pasukan keamanan nasional Afghanistan menyerah atau melarikan diri.¹³⁵ Kejatuhan Kabul pun terjadi secara dramatis tanpa pertempuran besar, memperlihatkan runtuhnya negara yang dibentuk dan didukung oleh Barat selama 20 tahun.

¹³⁴ Ali Zhafir Talmullah, Mansur, Dairatul Ma'arif, 'Realisasi Perjanjian Perdamaian Doha Dialogue Antara Afghanistan-Amerika Serikat Dan Taliban Periode Kepemimpinan Ashraf Ghani'.

¹³⁵ *Ibid.*

Pasca pengambilalihan kekuasaan, Taliban mendeklarasikan kembali berdirinya Imarah Islam Afghanistan, namun kali ini dengan janji akan bersikap lebih moderat. Mereka mengklaim akan menghormati hak-hak perempuan "dalam kerangka syariat Islam", menjamin keamanan semua kelompok etnis, dan tidak akan menjadi tuan rumah bagi kelompok-kelompok teroris internasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kebijakan lama tetap diberlakukan, terutama yang berkaitan dengan pembatasan terhadap perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan publik. Taliban juga kembali membubarkan lembaga-lembaga yang dianggap liberal, serta memperketat sensor terhadap media dan organisasi masyarakat sipil.¹³⁶

Meski demikian, dibandingkan dengan era pertama, Taliban kini menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam urusan diplomasi dan hubungan internasional. Mereka aktif membangun komunikasi dengan negara-negara seperti Cina, Rusia, Iran, Qatar, Turki, dan Pakistan. Tujuan utama dari manuver ini adalah untuk mendapatkan pengakuan resmi sebagai pemerintahan sah, serta mengamankan bantuan ekonomi dan investasi asing. Taliban juga menyadari bahwa keberlangsungan pemerintahan mereka sangat bergantung pada kestabilan ekonomi dan bantuan kemanusiaan dari luar, terutama mengingat kondisi ekonomi Afghanistan yang memburuk akibat sanksi, pemblokiran aset, dan kelumpuhan sistem perbankan.

¹³⁶ International Crisis Group, 'The Taliban's Neighbourhood: Regional Diplomacy in Afghanistan', 2024 <<https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/337-talibans-neighbourhood-regional-diplomacy-afghanistan>>.

Namun, meskipun ada langkah-langkah pragmatis di bidang politik luar negeri, tantangan domestik yang dihadapi Taliban sangat besar. Mereka tidak hanya harus mengelola negara yang porak-poranda akibat perang panjang dan ketergantungan pada bantuan luar negeri, tetapi juga menghadapi tantangan legitimasi internal dari berbagai kelompok etnis dan ideologi. Di beberapa wilayah, muncul kembali perlawanan bersenjata, termasuk dari mantan elemen Aliansi Utara dan kelompok baru seperti Front Perlawanan Nasional. Taliban juga masih harus menghadapi ancaman dari kelompok ekstrem lain seperti ISIS-K yang memanfaatkan kekosongan keamanan untuk menargetkan warga sipil, minoritas Syiah, dan bahkan pasukan Taliban sendiri.¹³⁷

Kebangkitan Taliban pada era kedua mencerminkan dinamika baru dalam politik Afghanistan. Mereka tidak lagi hanya sebuah gerakan militan, tetapi telah menjadi aktor politik penuh yang menguasai negara. Namun, keberhasilan mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam merespons tekanan domestik dan internasional, menyeimbangkan antara ideologi konservatif dan tuntutan modernitas, serta menunjukkan kapabilitas dalam mengelola negara secara efektif. Sejarah belum selesai menilai apakah kebangkitan Taliban ini akan membawa transformasi, atau justru mengulangi siklus otoritarianisme dan krisis yang pernah terjadi dua dekade silam.

¹³⁷ International Crisis Group, *Taliban Rule in Afghanistan: National Policies vs. Local Realities* (2021).